



12

28 Oktober 2010 - 28 oktober 2022

ALIANSI KEBANGSAAN

Merdeka, Bersatu, Berdaulat, Adil dan Makmur

Moderator:

Ki Bambang
(Penggiat Ya
Nusw

HUT ALIANSI KEBANGSAAN KE-12

“

**Orasi Visi Indonesia, dan
Peluncuran PODCAST
Tiga Ranah Pancasila:
"Saatnya Cendekiawan Bicara"**

PIDATO *Pontjo Sutopo*

28 OKTOBER 2022

Yth. Bpk Bambang Soesatyo, Ketua MPR-RI,

Yth.

Ketua Forum Rektor Indonesia,
Ketua Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia,
Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia,
Ketua YSNB,
Redaktur Harian Kompas,
Sdr. Garin Nugroho,
Para undangan dan hadirin sekalian yang saya muliakan,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas berkenannya, pada hari ini, kita semua diberi kesehatan untuk menghadiri peringatan Hari Ulang Tahun Aliansi Kebangsaan ke-12 yang bertepatan dengan peringatan momen historis Sumpah Pemuda. Aliansi Kebangsaan yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 2010 adalah jaringan intelektual lintas kultural dan lintas keyakinan, yang dipersatukan oleh kepedulian yang sama untuk memajukan kebangsaan yang berperadaban berdasarkan Pancasila dalam rangka mewujudkan cita-cita Proklamasi yakni Indonesia yang “merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Setiap kali memperingati hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, sudah sepatutnya kita melakukan refleksi diri (national self-reflection) atas “Kebangsaan Indonesia”, karena menyadari bahwa kebangsaan dapat tumbuh subur atau layu bahkan mati sesuai perkembangan dan tuntutan keadaan. Dengan refleksi diri yang jujur, kita dapat mengenali dan menakar potensi, kelemahan, pencapaian dan problematika pembangunan ke-Indonesiaan selama ini sebagai modal kesiapan menghadapi tantangan kekinian dan ke depan.

Tonggak sejarah terpenting dalam proses tumbuhnya atau pembentukan kebangsaan Indonesia adalah ketika “Sumpah Pemuda” diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 oleh para pemuda-pemudi dengan mengalahkan perbedaan etnik, budaya, agama, kepentingan, dan berbagai perbedaan latar belakang lainnya yang berkehendak dan berjanji untuk “bertumpah darah satu, tanah air Indonesia; berbangsa satu, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia”. Kekehendak dan janji inilah yang menjadi fondasi ke-Indonesiaan kita. melenyapkan sistem kekuasaan yang ada.”

Dari peristiwa sejarah Sumpah Pemuda tersebut, ada dua hal penting yang harus selalu kita ingat, yaitu: (1) Adanya “kesadaran dan pengakuan” atas berbagai perbedaan dan dengan “solidaritas ke-kitaan” yang kuat, menyatu dalam satu bangunan

ke-Indonesiaan, dan (2) Kerelaan mengorbankan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan untuk tujuan kolektif yang lebih besar demi kebajikan dan kemajuan hidup bersama. Inilah “janji kebangsaan” yang harus terus kita pelihara semangatnya. Peristiwa tersebut juga menandai adanya loncatan peradaban yang luar biasa, sebuah transformasi kultural dari nasionalisme etnis (ethno-nationalism) menjadi nasionalisme madani (civic nationalism).

Semangat kebangsaan tersebut terus mengkristal dan mewujudkan ke dalam bentuk yang lebih nyata ketika para pemimpin bangsa merumuskan dasar negara Pancasila, konstitusi negara UUD 1945, dan konsensus nasional lainnya sebagai bentuk penerimaan mereka terhadap watak pluralisme negara yang akan didirikan. Dan semangat tersebut menjadi “Elan Vital” perjuangan-perjuangan berikutnya hingga lahirlah Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.

Namun setelah 77 tahun Indonesia merdeka, dan 94 tahun Sumpah Pemuda diikrarkan, banyak pihak menengarai telah terjadi “erosi” bahkan perapuhan ke-Indonesiaan kita. Pancasila yang ditahbiskan sebagai dasar (filsafat) negara, pandangan dunia, norma dasar, ideologi negara, dan kepribadian bangsa Indonesia, belum sungguh-sungguh didalami dan dikembangkan menjadi “ideologi kerja (working ideology)” dalam praksis pembangunan yang memandu kebijakan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan. Masih terdapat jurang yang lebar antara idealitas Pancasila dengan realitas kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.

Karenanya, hari ini kita masih menghadapi berbagai problematik yang melemahkan ke-Indonesiaan kita, antara lain:

Pertama, Dalam bidang budaya, “ke-kita-an” mulai redup karena terjadi peluluhan sisi kompeten, serta rendahnya mutu manusia untuk memperjuangkan kebajikan dan kemajuan hidup bersama;

Kedua, Dalam bidang politik, ke-Indonesiaan kita robek karena belum kongruennya antara pembangunan negara (state building) dan pembangunan bangsa (nation building), serta melemahnya daya-daya hikmah kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan sehingga pengambilan keputusan politik lebih didasarkan kepada sumber-daya alokatif daripada sumber-daya otoritatif; dan

Ketiga, Dalam bidang ekonomi, masih rendahnya nilai tambah (added value) atas keunggulan komparatif yang kita miliki karena lebih mengedepankan ekonomi ekstraktif akibat tiadanya kedaulatan teknologi, sehingga ekonomi Indonesia rentan menghadapi goncangan dan kurang mampu menciptakan ruang kesempatan usaha yang luas dan inklusif. Kita juga masih mengalami kesenjangan kesejahteraan yang cukup lebar, baik antar golongan pendapatan maupun antar daerah/wilayah.

Pada saat yang bersamaan kita menghadapi arus globalisasi, disrupsi teknologi, serta dinamika global yang begitu cepat dan seringkali terjadi tiba-tiba tanpa terduga sebelumnya. Saat ini, dunia menghadapi tantangan dan ujian yang sangat berat. Selain karena berbagai krisis akibat pandemi Covid-19 yang belum sepenuhnya pulih, dunia juga dihadapkan pada ancaman krisis pangan, energi, hingga keuangan akibat perang Rusia-Ukraina yang berkelanjutan. Akibatnya, 107 negara terdampak krisis, sebagian di antaranya diperkirakan jatuh bangkrut. Diperkirakan 553 juta jiwa terancam kemiskinan ekstrem, dan 345 juta jiwa terancam kekurangan pangan dan kelaparan.¹

Tantangan ini tentu tidak mudah bagi dunia, demikian juga bagi Indonesia. Semua ini harus kita cermati, antisipasi, dan hadapi dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan. Sebagaimana selalu diingatkan oleh tokoh pertahanan Almarhum Jenderal TNI (Pur) Widjojo Soejono, kita tidak boleh abai (ignorance) apalagi kehilangan kewaspadaan (alertness) karena sesungguhnya “Kewaspadaan adalah harga sebuah Kemerdekaan”. George Ritzer dalam bukunya “The Globalization of Nothing” juga mengingatkan kita bahwa globalisasi terutama globalisasi budaya sangat berbahaya karena dapat menghilangkan identitas seseorang atau suatu bangsa. Namun sejarah peradaban mengajarkan kita bahwa krisis itu senantiasa berwajah ganda. Dalam ruang gelap bahayanya, selalu ada celah peluang untuk dimanfaatkan bagi memajukan kehidupan dan peradaban.

Menghadapi berbagai problematik kebangsaan dan perkembangan global terutama krisis yang bersifat eksistensial seperti saya sampaikan tadi, menuntut pendekatan-pendekatan baru bahkan lompatan “mind-set” sebagaimana pernah ditunjukkan oleh para pemuda dalam merespons tantangan pada masa kolonial di masa lalu. Ada dimensi waktu atau momentum yang harus dimenangkan dengan menjadikan krisis sebagai peluang. Karenanya, sangat diperlukan kehadiran kembali semangat “Sumpah Pemuda” terutama di kalangan pemuda sebagai generasi yang akan menentukan peta politik, peta ekonomi, bahkan eksistensi bangsa ke depan.

Dalam upaya menemukan satu pendekatan atau “mind-set” baru dalam menjawab berbagai problematika kebangsaan serta peningkatan kualitas hidup dan peradaban bangsa, Aliansi Kebangsaan bersama beberapa mitra lembaga lainnya, melalui rangkaian diskusi serial selama hampir tiga tahun sejak Maret 2019, berusaha membudayakan Pancasila secara sungguh-sungguh dengan menjadikannya sebagai “paradigma” atau kerangka operasional dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan usaha berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas hidup dan mutu peradaban melalui pemajuan kapabilitas dalam tiga ranah kehidupan sosial yaitu: ranah mental-kultural (tata nilai), ranah kelembagaan sosial-politik (tata kelola), dan ranah material-teknologikal

¹Sumber: Pidato Presiden di Sidang Tahunan MPR-RI, tanggal 16 Agustus 2022

(tata sejahtera). Tata nilai membangun kekuatan jiwa budaya kewargaan yang inklusif. Tata sejahtera membangun kemakmuran material yang inklusif. Tata kelola menjadi enabler, yang mendukung pembangunan rohani dan jasmani, melalui praksis politik yang inklusif.

Pembudayaan tata-nilai diarahkan untuk mengembangkan kepribadian nasional dan budaya kewargaan yang inklusif. Sebagai nilai inti moral publik, Pancasila bukanlah sebatas bahan hafalan, melainkan nilai hidup yang harus dialami dan dijalani penuh integritas, dengan menjaga konsistensi antara pikiran, perkataan, sikap dan perbuatan; antara keyakinan, pengetahuan, kebijakan dan tindakan. Kehendak dari bangsa yang majemuk untuk hidup bersama dalam bangunan ke-Indonesia-an sebagaimana diikrarkan pada Sumpah Pemuda yang lalu, perlu terus dipelihara dan diperkuat. Harus disadari bahwa kemajemukan Indonesia hanya bisa dipersatukan dengan faham kebangsaan.

Pembudayaan tata-kelola diarahkan untuk mengembangkan kehidupan politik yang inklusif, dengan mewujudkan Negara hukum dalam sistematis “kekeluargaan” (gotong-royong), yang mengintegrasikan kekuatan nasional melalui mekanisme demokrasi yang bercita kerakyatan, cita permusyawaratan dan cita hikmat-kebijaksanaan dalam suatu rancang bangun institusi-institusi demokrasi yang dapat memperkuat persatuan (negara persatuan) dan keadilan sosial (negara kesejahteraan). Pembangunan tata-sejahtera diarahkan untuk mengembangkan kemakmuran yang inklusif, dengan mengupayakan perekonomian merdeka; berlandaskan usaha tolong-menolong (semangat kooperatif), disertai pengusaan negara atas “karunia kekayaan bersama” serta atas cabang-cabang produksi yang penting dan yang menguasai hajat hidup orang banyak; seraya memberi nilai tambah atas keunggulan komparatif yang kita miliki dengan input pengetahuan dan teknologi.

Kita tidak boleh lagi terlena dengan kekayaan alam yang dianugerahkan kepada bangsa ini. Kalau bangsa Indonesia ingin maju, makmur, mandiri ekonominya, dan berdayasaing global, tidak ada pilihan selain terus mengupayakan transformasi dari perekonomian ekstraktif berbasis sumber daya alam menjadi ekonomi yang berbasis Ilmu pengetahuan agar mampu menciptakan ruang kesempatan usaha yang lebih luas dan inklusif.

Undangan dan Hadirin yang saya hormati,

Keberhasilan memajukan peradaban bangsa dengan meningkatkan mutu pada tiga ranah kehidupan seperti saya sampaikan tadi, sangat ditentukan oleh kehandalan atau kualitas manusianya (human capital). Negara yang pembangunannya bertumpu pada peningkatan dan kehandalan sumber daya manusia, ternyata mempunyai perkembangan yang jauh lebih baik dibandingkan negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam.

Terlebih, Indonesia saat ini sedang menikmati bonus demografi dimana jumlah penduduk produktif yang akan dimiliki oleh bangsa ini mencapai angka 65 persen dari total penduduk Indonesia. Bonus demografi adalah modal besar sekaligus “Windows of Opportunity” yang harus dikelola dan dimanfaatkan secara baik. Bonus demografi akan menjadi windows of opportunity bila disokong oleh manusia yang berkualitas. Namun sebaliknya dapat menjadi windows of disaster jika sebagian besar penduduk usia produktif berkualitas rendah.

Yang perlu kita sadari bersama, bahwa pembangunan manusia Indonesia tentu tidak terbatas pada dimensinya sebagai manusia individu dalam rangka memperbaiki kehidupannya, namun lebih jauh dari itu yaitu membangun manusia Indonesia dalam dimensinya sebagai warga masyarakat dan warga Negara agar mengerti hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, dalam rangka tumbuh dan berkembang bersama dalam ke-bhinekaan, sebagai suatu bangsa yang majemuk.

Untuk membangun Warga Negara unggul seperti itu, kita menaruh harapan besar kepada rezim pendidikan nasional sebagai upaya kolektif-sistemik dengan memperhatikan potensi budaya bangsa Indonesia yang multikultur. Oleh karena itu, variabel budaya menjadi sangat penting dalam mengembangkan sistem pendidikan nasional kita. Hal ini perlu saya tekankan, karena kebudayaan dan pendidikan itu merupakan dua variabel yang mempunyai hubungan resiprokal saling mempengaruhi.

Oleh karena itulah, Aliansi Kebangsaan juga menaruh perhatian besar pada pembangunan budaya karena harus diakui bahwa pembangunan bidang ini memang relatif tertinggal dengan pembangunan pada bidang-bidang lainnya seperti pembangunan politik, ekonomi, infrastruktur, dll. Dan untuk lebih memperkaya pemahaman kita terkait pembangunan manusia dan budaya, pada hari ini, akan disampaikan Orasi Ilmiah oleh Sdr. Garin Nugroho. Dan kegiatan orasi ilmiah semacam ini akan terus diupayakan pada setiap peringatan HUT Aliansi Kebangsaan di masa datang.

Hadirin yang saya hormati,

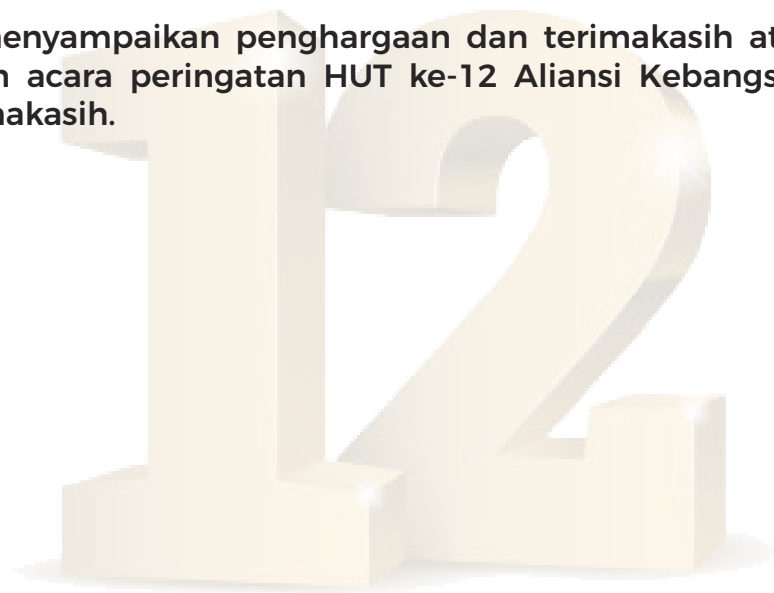
Sebagai bangsa yang lahir dari gagasan para kaum muda dan kaum cendekiawan melalui Budi Utomo dan Sumpah Pemuda di masa lalu, saya ingin mengajak para pemuda dan cendekiawan/intelektual untuk kembali terpanggil dalam memecahkan persoalan-persoalan mendasar yang dihadapi bangsa dalam membangun kebajikan dan kemajuan hidup bersama, terutama dalam menghadapi krisis global saat ini. Respons kita akan menentukan apakah Indonesia akan survive dan menjadi pemenang atau sebaliknya tertelan oleh krisis ini.

Bila kaum pemuda dan terpelajar, sebagai minoritas kreatif pada masa kolonial, mampu bangkit merespon tantangan zamannya, lantas apa respon kaum pemuda/terpelajar saat ini terhadap problematika kebangsaan dan kenegaraan yang muncul bersamaan dengan krisis global saat ini?

Dalam Kongres Kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 2021 di Gedung MPR-RI yang lalu, kaum pemuda/cendekiawan dari berbagai lintas profesi dan institusi, bekerjasama dengan masyarakat politik dan golongan pengusaha melalui “Ikrar Kebangkitan Kebangsaan” bertekad menjadikan krisis sebagai titik balik kebangkitan bangsa dan kebangkitan peradaban sebagaimana ditunjukkan oleh pemuda-pemudi Indonesia pada Kongres Pemuda-II pada 28 Oktober 1928 yang lalu.

Demikianlah beberapa pokok pikiran yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini, kiranya dapat menggugah kebersamaan dan semangat kita dalam menjawab tantangan kekinian terutama ancaman krisis global yang sudah di depan mata.

Akhirnya saya menyampaikan penghargaan dan terimakasih atas kehadiran para undangan dalam acara peringatan HUT ke-12 Aliansi Kebangsaan pada hari ini. Sekian dan Terimakasih.



**JAKARTA, 28 OKTOBER 2022
KETUA ALIANSI KEBANGSAAN**

Pontjo Sutowo

Aliansi Kebangsaan

Ketua Umum: Pontjo Sutowo
Sekretaris Jendral: Ahmad Zacky Siradj

Sekretariat:

Residence 2, Lt. 2 Komplek Hotel Sultan
Jln. Gatot Subroto, Jakarta 10270 –
Telp: 021-5704632/33

Media Sosial:

Fb: @jaringcendekia
Twitter: @aliansibangsa
Instagram: @aliansikebangsaan
Youtube: Forum Kebangsaan
Telepon: (021) +6221-5704633-32
Email: kongreskebangsaan@gmail.com

Narahubung: Indri Ayu, M.Han (+6281290254794)

www.aliansikebangsaan.org
www.forumkebangsaan.com